

Jokowi Bahas Mekanisme Pasar Karbon dengan Sejumlah Menteri

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat kebijakan perdagangan karbon di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/5). Dalam rapat tersebut, salah satu poin yang dibahas adalah mekanisme pasar karbon di Indonesia. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia memiliki potensi karbon yang luar biasa.

"Tetapi belum memiliki mekanisme pasarnya. Untuk itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur mekanismenya," ujar Bahlil dalam kererangannya usai pertemuan. "Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi ke luar negeri, bisa dijual," katanya lagi.

Bahlil mengatakan, apabila tidak ada tata kelola dan sertifikasi, pemerintah tahu seberapa banyak karbon yang terbuang ke luar negeri. Padahal, menurutnya, karbon bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan, nantinya proses registrasi karbon akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Setelah melakukan registrasi, maka perdagangan di bursa karbon bisa dilakukan. "Sebelum masuk ke bursa karbon diregistrasi dulu oleh LHK, setelah itu baru bisa melakukan perdagangan di bursa karbon."

Setelah melakukan perdagangan di bursa karbon, dia bisa melakukan trading seperti trading saham biasa," ujarnya.

Selanjutnya, dalam rapat tersebut pemerintah juga menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon yang lain di luar negeri. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbon-dioksida di Indonesia yang sangat besar justru dikapitalisasi oleh negara tetangga.

"Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasilan karbon, tidak punya tempat CO₂, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin," kata Bahlil.

"Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus pendapatan untuk negara," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Kepala OJK Mahendra Siregar menjelaskan perkembangan pembentukan bursa perdagangan karbon yang sebelumnya sudah direncanakan.

Menurut Mahendra, saat ini pemerintah masih menyusun peraturan dan teknis bursa perdagangan karbon tersebut.

"Kita lagi siapkan. Lagi disiapkan bursanya. Jadi peraturannya maupun mekanismenya," kata Mahendra usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Selasa (7/3).

"Memang kita lagi siap karena keputusan, Undang-undanganya belum siap," ujarnya lagi. ● mei

Panglima TNI Lakukan Mutasi terhadap 172 Jenderal TNI

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan terhadap sejumlah perwira tinggi di tiga matra TNI.

Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/426/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 172 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 85 Pati TNI AD, 37 Pati TNI AL dan 50 Pati TNI AU. ● mei

KPU Jamin Publik Bisa Akses Dokumen Pencalegan, keculi ...

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin bahwa publik bisa mengakses dokumen-dokumen terkait pencalonan anggota legislatif (caleg). Saat ini tahapan pendaftaran bakal caleg sudah berlangsung, sejak Senin (1/5) hingga Minggu (14/5).

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, berujar bahwa akses terbuka untuk publik ini tak terlepas dari digitalisasi yang diterapkan KPU lewat Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

"Kami pastikan bahwa dalam tahapan pencalonan ini sepenuhnya menggunakan digitalisasi sehingga nanti publik dapat mengaksesnya, khususnya dokumen yang tidak dikategorikan dokumen yang dirahasiakan," kata Idham, Rabu (3/5).

Ia menyoroti daftar riwayat hidup para bakal caleg yang nanti juga bisa dipublikasikan oleh KPU pada waktunya. Namun demikian, publikasi daftar riwayat hidup itu disebut memerlukan izin dari para bakal caleg dan KPU akan berhati-hati soal "informasi yang dikucual-

ikan" untuk dipublikasi. "(Informasi yang dikucualikan) itu diatur dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (tentang Keterbukaan Informasi Publik)," ujarnya.

Di dalam pasal tersebut, terdapat sejumlah pengaturan soal kategori informasi yang dikucualikan, beberapa di antaranya berkaitan dengan informasi yang jika dibuka dapat mengganggu proses penegakan hukum, hubungan kenegaraan, atau mengungkapkan rahasia negara.

Berkaitan dengan informasi pribadi, beberapa informasi yang dikucualikan diatur dalam huruf g dan h pasal tersebut. Pasal 17 huruf g mengatur bahwa informasi yang dikucualikan termasuk "informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan dokumen yang dirahasiakan," kata Idham, Rabu (3/5).

Sementara itu, Pasal 17 huruf h mengatur bahwa informasi yang dikucualikan termasuk "informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Kemudian hasil-hasil evaluasi subhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



KUNJUNGAN MENHAN

DI YOGYAKARTA Menhan Prabowo Subianto (ketiga kanan) menyapa anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) saat melakukan kunjungan di Koramil Gondomanan, Yogyakarta, Rabu (5/3). Dalam kunjungan itu Menhan menyerahkan kendaraan dinas sepeda motor untuk para Babinsa di wilayah Kodim 0734/Kota Yogyakarta.

Jenderal Dudung Ngamuk Lantaran Asrama Prajurit TNI Dibangun Asal-asalan

Jenderal Dudung mendesak keras agar rekanan penerima pekerjaan pembangunan asrama Yonif Mekanis 516/CY di Gresik, segera dievaluasi.

GRESIK (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman marah besar saat meninjau pembangunan asrama milik Yonif Mekanis 516/CY, di Desa Wedoroanom, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (2/5).

Jenderal Dudung merasa kecewa dan melihat kualitas pembangunan jauh dari standar. Mutu pekerjaan yang dilaksanakan pihak rekanan dianggap tidak sesuai dengan fakta yang dijanjikan.

Pembangunan asrama tersebut merupakan bentuk kepedulian pimpinan TNI-AD terhadap kesejahteraan prajurit. Rumah kini dihuni

sekitar 50 kepala keluarga dari 89 unit.

Jenderal Dudung pun mendesak keras agar rekanan penerima pekerjaan tersebut segera dievaluasi kembali. Utamanya supaya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah diterima atau dijanjikan.

"Bagaimana bisa nyaman tinggal di sini kalau di dalamnya panas, pengap karena tidak ada ventilasi. Kasihan prajurit yang sudah kepanasan di hutan, tapi sampai di rumah masih kepanasan juga," kata Jenderal Dudung.

"Panggil segera rekanan pembangunannya, lakukan

perbaikan, cat ulang, harus ada perbaikan, apalagi bocor di mana-mana. Pokoknya saya ingin tempat tinggal ini harus nyaman dan berfungsi baik untuk prajurit," tambahnya.

Jenderal Dudung pun memberikan contoh pembangunan markas komando sangat bagus. Namun ironisnya berbanding terbalik dengan rumah tinggal untuk prajurit yang kerap tidak sesuai spesifikasi yang dijanjikan atau terkesan asal-asalan.

Padahal, seharusnya, harus dijamin kualitas, serta hasil pembangunan tetap terjaga dan bisa bermanfaat.

"Kita seharusnya menjadi contoh dan bukan bermegah-megahan. Bangun markas komando saja bisa megah, tapi rumah prajurit jelek. Harus dibuat agar nyaman dan berfungsi baik. Pengembangannya harus bertanggung-jawab, jangan-jangan banyak

korupsinya," katanya.

"Saya saja ditawari uang oleh rekanan tapi saya tolak. Ada buktinya. Sebab, kalau saya terima pasti mempengaruhi hasil yang dibuat, akan tidak baik, tidak bisa sesuai spesifikasi," imbuhnya.

Salah satu penghuni rumah, Pratu Robby Nalis anggota Kompi 516 bersama istri, Zulia Puspita Ningrum juga menyampaikan keluhannya kepada Jenderal Dudung. Ia mengatakan, bahwa rumah yang dihuninya sudah bocor.

"Belum ada tiga bulan ditempati tapi dua kamar saya bocor, teras depan juga lalu wastafel airnya mengembung dan tidak mengalir," katanya.

"Sempat kemarin ditinggal pulang kampung dan kebakaran karena air masuk dari belakang dan tidak keluar

ke saluran depan. Semoga setelah ini ada perbaikan dan nyaman ditinggalkan. Terlebih saya akan punya bayi pertama dalam waktu tiga bulan lagi," katanya.

Di kesempatan yang sama, Jenderal Dudung juga mendoakan Zulia agar nantinya dapat melahirkan dengan selamat dan sehat.

"Terima kasih banyak Bapak KASAD. Saya kini hamil tujuh bulan dan dikunjungi, diperhatikan, diberikan 'salam tempel' serta didoakan. Semoga bapak KASAD sehat selalu dan lancar rezekinya," katanya.

"Tadi Bapak berpesan agar nama anak saya dibelakngnya ada Abdurachman-nya. Semoga suami saya bisa mewujudkannya. Sekali lagi terima kasih banyak," ujarnya. ● han

NasDem Sebut Surya Paloh Hormati Pertemuan Jokowi dengan Ketum Parpol

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menghormati pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ketua umum enam partai politik koalisi pemerintah, Selasa (2/5) malam.

Surya Paloh yang sedang berada di luar negeri diketahui tidak hadir meski Nasdem juga sama-sama partai koalisi pemerintah.

"Benar sekali. Segala pertemuan untuk kepentingan bangsa dan negara, harus selalu kita hormati dan hormati. Termasuk, pertemuan tadi malam," kata Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem, Charles Meikyansah kepada wartawan, Rabu (3/5).

Charles mengatakan, pernyataan itu merupakan pesan dari Surya Paloh terkait pertemuan di Istana antara Jokowi dan para ketua partai politik koalisi.

Charles mengatakan, Surya Paloh menilai pertemuan yang diadakan oleh Presiden Jokowi itu sangat

penting. Khususnya bagi persoalan yang dihadapi bangsa saat ini. "Karena banyak masalah-masalah kebangsaan yang sangat penting dibicarakan dan diselesaikan bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut, Charles menegaskan bahwa tidak hadirnya Surya Paloh dalam pertemuan itu tak membuat hubungan dengan Presiden Jokowi renggang. "Hubungan dengan Pak Jokowi dalam hubungan yang baik-baik saja," katanya.

Diketahui, Nasdem membenarkan bahwa Surya Paloh tak mendapat undangan dari Presiden Jokowi yang melakukan pertemuan dengan para ketua umum parpol koalisi pada Selasa malam.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan alasan Surya Paloh yang tidak hadir dalam silaturahmi para ketua parpol dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa malam. Menurut Prabowo, Surya Paloh sedang berada di luar negeri. ● han

Penyidik Lembaga Antirasuah Panggil 3 Saksi Usut Gratifikasi Eks Pejabat Pajak Rafael Alun

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil tiga saksi terkait terkait dugaan penerimaan gratifikasi mantan Pejabat Direktorat Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu), Rafael Alun Trisambodo (RAT), Rabu (3/5).

Ketiga saksi tersebut yakni, dua Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Putranti Wahyuningih dan Lieve Lianadevi Tugali, serta Manager Marketing Apartemen Signature Park Grande. Ketiga saksi tersebut diminta untuk hadir ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kavling 4 Jakarta Selatan, atas nama tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu

(3/5). Belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik dari keterangan ketiga saksi tersebut. Diduga, penyidik sedang menelusuri aset-aset milik Rafael Alun Trisambodo yang merupakan hasil pencucian uang. Sebab, Rafael memiliki banyak aset yang janggal.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di DJP. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu Dollar Amerika Serikat atau setara Rp1,34 miliar.

Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kemkeu. Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemkeu.

Rafael diduga menerima

gratifikasi melalui perusahaan jasa konsultansi perpajakan miliknya yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT AME). Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib pajak yang mempunyai masalah perpajakan.

Atas perbuatannya, Rafael disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Sejauh ini, KPK belum menjerat Rafael Alun sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tapi, KPK membuka peluang untuk menjerat Rafael sebagai tersangka pencucian uang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. ● mei

FOTO: ANT



SIDANG LANJUTAN KASUS KORUPSI JASINDO

Terdakwa kasus korupsi Jasindo Budi Tjahjono (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/5). Sidang mantan Direktur Utama Asuransi Jasindo itu beragenda mendengarkan keterangan saksi.

PENGUMUMAN

Memperhatikan ketentuan pasal 20 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan ini diberitahukan bahwa akan dilakukan penjualan dibawah tangan, berupa: Ruko SHGB No.01657/Pulogadung a.n PT. Sandhy Putra Makmur terletak di Komplek Pertokoan Pulomas Blok VI No.12, Kel. Pulogadung, Kec. Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

Apabila terdapat pihak yang berminat atau merasa keberatan atau keperluan terhadap penjualan dibawah tangan agunan objek tersebut diatas dapat menghubungi:

- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Retail Collection & Recovery V, selaku Pemegang Hak Tanggungan, di alamat Jalan Kebon Sirih No.83 Thamnir, Jakarta Pusat.
- PT. Sandhy Putra Makmur – selaku Pemberi Hak Tanggungan, di Alamat Gedung BLK Sandhy Putra, Jl. Telkom 5 No.10 RT.006 RW.001, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12830

Selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya pengumuman ini.

(PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.)

INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 17 Mei 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu Center Point

Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.373, Surakarta, Jawa Tengah

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin Kantor Solo (0271) 665252 (Hunting)

Hormat Kami,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin